



# E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://epaper.dpr.go.id>

**Judul** : Ketergantungan pada Batubara Berisiko  
**Tanggal** : Selasa, 04 Januari 2022  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 8

<https://epaper.kompas.id/pdf/show/20220104> Kompas, 04-Januari 2022 hal. 8 Ketergantungan pada Batubara Berisiko Pemerintah harus mulai meninggalkan ketergantungan terhadap batubara. Kebijakan larangan ekspor batubara dinilai tidak terlalu berdampak bagi lingkungan ataupun ekonomi. JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan larangan ekspor batubara yang berlaku 1-31 Januari 2022 di-pandang tidak terlalu berdampak signifikan bagi lingkungan ataupun ekonomi. Pemerintah perlu melakukan evaluasi se-cara menyeluruh rencana ener-gi nasional agar mampu me-ngurangi kecanduan, bahkan meninggalkan konsumsi batu-bara. Juru Kampanye Jaringan Ad-vokasi Tambang (Jatam) Nasi-onal Ki Bagus Hadi Kusuma mengemukakan, kebijakan pe-merintah menunjukkan potret sebenarnya bahwa Indonesia sangat kecanduan sumber ener-gi batubara. Selain itu, batubara pun menjadi sumber komoditas ekonomi. "Pada 2021, hampir 90 per-sen dari total 611 juta ton pro-duksi batubara ditujukan untuk ekspor. Jadi, selama ini, jargon batubara untuk kebutu-han rak-yat juga tidak benar. Jadi, menghentikan ekspor menjadi solusi malas ketika sekarang terjadi krisis listrik karena pa-sokan batubara dalam negeri berkurang," tutur Bagus, Senin (3/1/2022), di Jakarta. Seperti diberitakan, Kemen-terian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melarang eks-por batubara bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dan perjanjian karya perusahaan pertam-bangan batubara (PKP2B). Ke-bijakan ini dikeluarkan guna menjamin terpenuhinya kebu-tuhan batubara untuk pem-bangkit listrik tenaga uap (PL-TU) grupPTPerusahaanListrik Negara (PLN) dan produsen lis-trik independen (IPP) yang ke-kurangan pasokan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Jamaludin me-yakini, jika kebijakan pelarang-an ekspor tidak diambil, keku-rangan pasokan batubara akan berdampak kepada lebih dari 10 juta pelanggan PLN, mulai dari masyarakat umum hingga in-dustri di dalam dan di luar Jawa, Madura, dan Bali. Hampir 20 PLTU dengan daya sekitar 10.850 megawatt (MW) juga akan padam dan berpotensi mengganggu kestabilan pereko-nomian nasional (Kompas, 3/1/2022). Sangat bergantungnya Indo-nesia terhadap ekspor batubara inilah yang menurut Bagus membuat aspek ekonomi sema-kin dikorbankan. Karena itu, ke depan pemerintah harus mulai meninggalkan ketergantungan-nya terhadap batubara, baik se-bagai sumber pemenuhan ener-gi maupun ekonomi. Dari aspek lingkungan, ba-tubara sebagai energi fosil juga sangat kotor dan menjadi salah satu penyumbang emisi terbe-sar di dunia. Bagus mendorong pemerintah segera berhenti membangun PLTU batubara. Selain menyebabkan polusi dan daya rusak yang tinggi dari hulu hingga hilir, batubara juga sa-ngat rentan sebagai komoditas tambang seperti kondisi yang terjadi sekarang. "Dari sisi lingkungan, kebi-jakan ini tidak akan berdampak apa pun kalau hanya sekedar menghentikan ekspor batubara selama satu bulan tanpa diiringi pemulihan lahan dan lingkung-an di tingkat tapak. Di sisi lain, pasar batubara dalam negeri di-dorong untuk terus meningkat melalui program-program, se-perti elektrifikasi 35 gigawatt (GW)," katanya. Namun, penghentian operasi PLTU batubara ini juga harus diiringi dengan pengembangan pembangkit listrik energi baru terbarukan yang bersih dan ra-mah lingkungan. Beberapa energi bersih yang dapat di-kembangkan dan melimpah pa-sokannya adalah surya dan angin. Kementerian ESDM menca-tat, potensi energiterbarukandi Indonesia diperkirakan lebih dari 400.000 MW. Namun, pe-manfaatannya masih amat mi-nim, kurang dari 11.000 MW. Pencapaian energi baru terba-rukan dari sektor pembangkit listrik saat ini baru 12-13 persen. Akan tetapi, pencapaian secara keseluruhan tercatat lebih ren-dah, yakni sekitar 10 persen. Sementara hasil kajian Insti-tute for Essential Services Re-form (IESR) bersama Global Environment Institute, China, menunjukkan potensi tenaga surya di Indonesia mencapai hampir 20.000 GW. Angka ter-sebut jauh melampaui data po-tensi dari pemerintah, yakni se-besar 207 GW. Potensi energi baru terbaru-kan wilayah Indonesia timur, khususnya Maluku dan Maluku Utara, juga cukup tinggi. Terca-tat potensi energi surya di dua provinsi tersebut sebanyak 721 GW, energi air 1,5 GW, dan biomassa 75 MW. Adapun un-tuk potensi energi angin dapat mencapai 15,5 GWdi ketinggian 50 meter dan 15,9 GWdi keting-gian 100 meter. Evaluasi Bagus menekankan, peme-rintah perlu mengevaluasi ren-cana umum energi nasional (RUEN) dan rencana usaha pe-nyediaan tenaga listrik (RUP-TL) secara menyeluruh. Hal ini diperlukan agar Indonesia be-nar-benar bisa mengurangi ke-canduan dan meninggalkan konsumsi energi batubara. "Seharusnya larangan ekspor batubara ini bukan hanya se-mentara, tetapi juga dilakukan seterusnya sambil beralih ke energi terbarukan yang melimpah dan aman. Harapannya, ka-lau larangan ekspor ini berlan-jut, akan menurunkan eksploi-tasi batubara di tapak-tapak pertambangan," ucapnya. Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Teng-gara Tata Mustasya juga me-nyampaikan hal senada. Menu-rut Tata, larangan ekspor sela-ma satu bulan masih membuat kuota produksi batubara tetap tinggi menyusul kenaikan har-ga. Produksi batubara selama satu bulan diperkirakan turun, tetapi tidak sepanjang tahun 2022. Tata menilai, kondisi kurang-nya pasokan batubara yang ter-jadi saat ini dapat menjadi mo-mentum transisi energi pada sektor hilir. Sebab, kondisi de-fisit sekarang menunjukkan PLTU batubara tidak hanya me-nyebabkan kerusakan ling-kungan dan krisis iklim, tetapi juga mengancam ketahanan energi dalam negeri. "Harga batubara akan selalu fluktuatif dan pasokannya di masa depan juga lebih tidak menentu. Hal ini berbeda apa-bila dibandingkan dengan ener-gi surya yang pasokannya me-limpah dan harganya semakin murah," ucapnya nya. (MTK)